

Tatanan Informasi Internasional Baru (TIIB)

John Tondowidjojo

Pendahuluan

DALAM abad XIX perkembangan komunikasi internasional cenderung mengikuti pola negara-negara Atlantik Utara. Kartel kantor-kantor berita Eropa dan Amerika membagi dunia menurut wilayah pengaruh politik dan ekonomi pada masa itu. *Reuters* di London mengambil wilayah Kerajaan Inggris; *Havas* di Paris mempengaruhi dunia Amerika Latin dan daerah-daerah jajahan berbahasa Perancis; *Wolf* di Berlin mempengaruhi negara-negara Skandinavia dan Eropa Timur; *American Associated Press* dan *United Press* mengikuti perkembangan Amerika Serikat. Akibat perkembangan dan pengelompokan bersama kekuasaan Roma, maka kabel-kabel transatlant, frekuensi-frekuensi radio, dan satelit-satelit telah menjadi bagian hidup negara-negara modern.

Setelah Perang Dunia II pergerakan-pergerakan pembebasan nasional di Afrika,

Asia, dan kini di Amerika Latin telah mengubah struktur politik dunia. Namun, struktur ketergantungan ekonomi dan informasi yang lama tetap bertahan. Dalam hal ini negara-negara Atlantik Utara tetap mempertahankannya sampai sekarang.

Negara-negara baru secara sah berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang sesungguhnya sampai mereka dapat membangun pola komunikasi yang adil dan horisontal di antara mereka sendiri. Mereka juga harus mengubah bentuk komunikasi internal yang asalnya dibangun di sekitar elit tradisional atau *enclave expatriate* kolonial, menjadi suatu pelayanan bagi pertumbuhan nasional asli yang demokratis.

Tulisan ini memusatkan perhatian pada dua aspek penelitian yang baru-baru ini diusulkan oleh Tatanan Informasi Internasional Baru:

- 1) Penelitian yang mengungkapkan dan menentukan sebab-sebab ketergantungan Dunia Ketiga dalam komunikasi internasional.

- 2) Penelitian tentang efektivitas lembaga-lembaga komunikasi yang baru, seperti kantor berita Negara-negara Non-Blok.

Analisis Persoalan-persoalan dalam "Tatanan Lama"

Nordenstreng dan Schiller dalam buku mereka *National Sovereignty and International Communication*, menunjukkan tiga perkembangan pemikiran tentang pembangunan lembaga-lembaga komunikasi di negara-negara baru.¹ Perkembangan pemikiran pertama, yang dicetuskan oleh Lerner dan Schram dalam tahun 1950-an dan permulaan 1960-an, melihat pembangunan sebagai komunikasi teknologi antar lembaga-lembaga sosial Dunia Barat yang maju dengan sektor elit dan modern dari negara-negara berkembang, dan melalui sektor elit ini, dengan daerah-daerah terbelakang yang masih belum terjangkau. Tetapi, model ini telah menimbulkan berbagai persoalan, antara lain semakin kuatnya ketergantungan negara berkembang pada negara-negara industri. Golongan elit yang berorientasi Barat tumbuh begitu kuat dan cenderung lebih mengeksploitasi petani di daerah terpencil daripada mengusahakan pembangunannya. Akibatnya, tradisi-tradisi kebudayaan nasional menjadi terancam.

Karena kritik yang meningkat, timbullah perkembangan pemikiran kedua yang mengemukakan bahwa sistem komunikasi terpusat, dari atas ke bawah, di negara-negara baru harus mempersatukan jaringan komunikasi dengan pembuatan keputusan komunitas-komunitas setempat dan organisasi-

organisasi rakyat.² Tetapi, ini tidak menghilangkan kontradiksi paradigma lama yang fundamental: yang mengharapkan suatu elit yang langsung bergantung pada negara-negara Atlantik Utara, memodernisasi untuk menjadi penggerak kemerdekaan politik, ekonomi dan kebudayaan.

Menurut Nordenstreng dan Schiller, paradigma perkembangan ketiga lebih dapat diterima. Paradigma ini melihat subordinasi negara-negara berkembang pada suatu sistem *global market* sebagai rintangan fundamental dalam memperluas sistem-sistem komunikasi. Persoalan arus berita yang tidak seimbang, kurangnya kreativitas media massa lokal, dan pengaruh negatif pembuatan program yang diimpor terhadap kebudayaan tradisional, semua itu hanyalah aspek-aspek dari ekonomi internasional dan sistem informasi yang sekarang.

Ini menunjukkan bahwa prioritas-prioritas bagi penelitian harus diarahkan pada: (1) analisis proses-proses ekonomi dan politik di mana ketergantungan dalam lembaga-lembaga komunikasi dipertahankan; (2) studi tentang bagaimana pergerakan pembebasan nasional, seperti pergerakan dari Tanzania atau Nikaragua menghasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan komunikasi yang lebih bebas dan merupakan ungkapan kebudayaan asli; dan (3) pengkajian perkembangan-perkembangan ke arah komunikasi yang lebih horisontal dan kooperatif di antara negara-negara berkembang.

Ketergantungan Siaran Dunia Ketiga

Di banyak negara berkembang, sebagian besar pembuatan program televisi, dan

¹Kaarle Nordenstreng and Herbert Schiller (eds.), *National Sovereignty and International Communication* (New Jersey: Ablex, 1979).

²Everett Rogers, ed. *Communication and Development: Critical Perspectives* (Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1976).

dalam ukuran lebih kecil program radio, diimpor langsung. Sekalipun pembuatan program dikerjakan oleh tenaga setempat, format dasarnya adalah Anglo-Amerika.

Suatu pendekatan dalam analisis persoalan ini adalah pengkajian deskriptif tentang kemajuan dan rintangan-rintangan dalam mengembangkan pola-pola baru administrasi media, format pembuatan program, dan isi yang lebih sesuai dengan kebudayaan-kebudayaan asli serta tujuan-tujuan nasional. Contoh yang baik mengenai penelitian seperti ini adalah *Broadcasting in the Third World* oleh Katz dan Wedell.³ Mereka menyelidiki siaran radio dan televisi di sebelas negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk menentukan sumbangan-sumbangan siaran terhadap tiga tujuan: integrasi nasional, modernisasi sosial ekonomi, dan kreativitas kebudayaan.

Hasil temuan umum semata-mata menegaskan bahwa di sebagian besar negara, model-model yang diwarisi sedang diterapkan dengan "terlalu sedikit mempersoalkan asal-usul atau manfaatnya untuk kehidupan rakyat". Katz dan Wedell menunjukkan faktor-faktor penyebab ketergantungan yang berkelanjutan:

1. Sistem-sistem siaran di Asia dan Afrika dibangun selama masa kolonial dan pada mulanya sering dimaksudkan bagi *expatriate* komunitas Inggris atau Perancis dan kelompok elit yang dilahirkan dalam pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, tenaga pribumi terus dididik dengan sedikit dorongan untuk pembuatan format-format media baru. Tidak mengherankan kalau sistem-sistem siaran ini

sangat mirip BBC, RTF Perancis; sedangkan di Amerika Latin stasiun-stasiun komersial lokal dalam jaringan nasional menyerupai model Amerika Serikat;

2. Personil, khususnya bagi televisi, cenderung diambil dari kelompok orang kota berorientasi Barat yang berpendidikan lebih baik dan mengetahui sedikit tentang kebudayaan-kebudayaan asli mereka sendiri;
3. Ada desakan ke arah pembuatan program televisi dan radio "secara non-stop", sehingga sumber-sumber bagi pembuatan program produksi lokal cepat habis dan tidak ada alternatif kecuali serial dan musik pop murah yang diimpor. Belajar menghasilkan pembuatan program yang menarik dengan anggaran rendah memerlukan suatu pendekatan pendidikan yang sangat berbeda.⁴

Katz dan Wedell mengumpulkan banyak data berharga yang melukiskan persoalan ini. Tetapi alasan-alasan ketergantungan di atas mengungkapkan suatu ulangan tak berguna yang mendasar dalam perencanaan penelitian.⁵ Siaran di Dunia Ketiga tidak mengembangkan banyak kreativitas bebas karena personil, format-format media, dan sebagainya tetap bergantung. Tanpa suatu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan ketergantungan yang umum, sudah tentu tidak ada jalan keluar yang jelas dari dilema itu.

Suatu penjelasan mengapa lembaga-lembaga media kelihatan lebih mampu mengembangkan kreativitas di beberapa negara dan tidak di tempat-tempat lain, dapat ditemukan dengan menyelidiki perkembangan

³Elihu Katz and Wedell George, *Broadcasting in the Third World* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1977).

⁴Ibid.

⁵Ibid.

siaran sehubungan dengan proses sosial-ekonomi-politik yang lebih luas. Aljazair dan Nigeria, misalnya, telah bertahan pada suatu standar pembuatan program televisi lokal yang tinggi (Nigeria 70% dan Aljazair 50%). Tanzania, negara miskin tanpa minyak seperti Nigeria, telah terpaksa menunda pembangunan televisi sampai mempunyai sumber-sumber tenaga dan keuangan untuk membangun media ini menurut tujuan-tujuan nasionalnya sendiri.

Peru juga telah menetapkan suatu politik siaran berorientasikan tujuan-tujuan kebudayaan dan pendidikan nasional. Aljazair, Tanzania dan dalam hal tertentu Nigeria dan Peru, semuanya ditandai oleh pergerakan-pergerakan pembebasan nasional yang kuat dan ini kelihatannya merupakan pengaruh besar dalam perkembangan politik siaran.

Makin tingginya kreativitas dalam pembuatan program lokal tidak selalu diartikan sebagai penggunaan seperangkat teknik yang dapat dipasang seperti begitu banyak perlengkapan, melainkan bagian kehidupan kembali kebudayaan yang menyertai pergerakan-pergerakan yang kuat ke arah kemerdekaan politik dan ekonomi.

Mekanisme Dominasi Kebudayaan

Herbert Schiller, seorang pelopor yang merumuskan penelitian mendasar dalam masalah-masalah politik, telah menyoroti kehancuran kebudayaan-kebudayaan nasional tertentu sebagai akibat dari konsentrasi penguasaan yang meningkat atas media dunia di tangan sebagian besar kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi Amerika.⁶

⁶Herbert I. Schiller, *Communication and Cultural Domination* (White Plains, N.Y.: M.E. Sharpe, 1976).

Dalam berbagai artikel dan bukunya, Schiller mengidentifikasi banyak pengaruh berkenaan dengan proses "homogenisasi kebudayaan" yang bervariasi, dari turisme internasional sampai profesionalisasi media, tetapi empat mekanisme utama dilihat sebagai yang paling penting: (1) *strategi politik* (diplomasi) dan *keamanan* militer Amerika Serikat di dalam komunikasi satelit internasional; (2) *sistem global market* yang makin dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional; (3) *komersialisasi* yang meningkat dari media di seluruh dunia dan pengaruh "industri kebudayaan" Amerika Serikat dalam film, televisi dan musik pop; dan (4) *definisi teknologi komunikasi* yang dianggap *value-free* menurut kebutuhan dan nilai-nilai Anglo-Amerika.

Penelitian Schiller itu cukup efektif dalam mengungkapkan agenda yang tersembunyi di balik masalah-masalah politik. Dalam teori *free flow of information* bentuk "ekonomi bebas" dan "pertukaran informasi yang bebas" tampaknya merupakan cara terbaik untuk alokasi barang-barang dan informasi kepada mereka yang membutuhkannya. Tetapi dalam periode pasca-Perang Dunia II, pada saat *ekonomi Eropa* hancur dan Amerika Serikat berada pada puncak kekuatannya, Amerika Serikat dapat mengkonsolidasikan monopoli yang sesungguhnya dalam *communication market* internasional. Negara-negara Dunia Ketiga yang ekonomi dan teknologinya lemah menderita kerugian, baik dalam *free market* maupun dalam sistem *free flow of information*. Ironisnya, negara-negara yang mendukung asas *free flow* adalah pembela paling kuat atas hak cipta, paten dan informasi keamanan nasional guna melindungi keuntungan teknologis mereka. Suatu contoh lain adalah kepercayaan akan *culture free technology*.

Teknologi, khususnya teknologi komunikasi, adalah produk akhir suatu proses seleksi panjang yang merefleksikan nilai-nilai dan struktur kekuasaan suatu masyarakat tertentu.

Peranan Perusahaan-perusahaan Multinasional

Penelitian "imperialisme kebudayaan" paling kuat menunjukkan betapa jauh perusahaan-perusahaan multinasional menembus media setempat yang akhirnya banyak mendiktekan isi pembuatan program, sebagaimana diuraikan oleh Armand Mattelart dalam bukunya *Multinational Corporations and the Control of Culture*.⁷ Menurut Mattelart, multinasional-multinasional membawa suatu strategi pemasaran yang dipersiapkan sebagai model bagi periklanan massal dan seringkali disertai agen periklanan multinasional seperti *McCann-Erikson*. Surat kabar-surat kabar setempat, radio dan televisi -- yang seringkali secara finansial sangat lemah -- segera mengetahui bahwa jumlah besar anggaran mereka datang dari multinasional-multinasional. Akhirnya, para ahli pemasaran dan agen-agen periklanan mendesakkan suatu format pembuatan program hiburan ringan, yang seringkali diimpor, yang sesuai dengan penjualan produk-produk mereka. Sekali media setempat dari segi ekonomis tergantung, maka hal itu akan membawa pengaruh yang besar terhadap kebudayaan dan politik setempat.

Tetapi penelitian ini sebagian besar lemah dalam menunjukkan bahwa isi media

impor itu mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan kebudayaan suatu negara. Penelitian Beltran dan Cardona mengenai pengaruh Amerika Serikat dalam media Amerika Latin, memberikan hasil-hasil beberapa studi tentang pengaruh media yang nyata.⁸ Salah satu studi tersebut menunjukkan bahwa anak-anak Amerika Latin cenderung mengidentifikasi orang-orang Amerika Utara berkulit putih, kaya, yang pergi ke seantero dunia sambil menabur keadilan dan perdamaian sebagai para pahlawan; sedangkan orang-orang jahat adalah golongan berkulit berwarna, miskin, berlatar belakang Amerika Latin, dan pekerja.

Perbedaan Pendapat Mengenai Tesis Imperialisme Kebudayaan

Dalam *The Media are American*, Jeremy Tunstall mengakui dominasi Anglo-Amerika di dalam komunikasi-komunikasi internasional, tetapi membantah bahwa orang harus melangkah di luar fenomena ekspansi multinasional pasca-Perang Dunia II untuk menjelaskan dominasi ini.⁹ Dia memberikan bukti untuk menunjukkan bahwa politik dan sosial abad ke-19 memungkinkan para pengusaha media Amerika menggabungkan teknologi dan strategi pemasaran bagi suatu format media massa rakyat dalam surat kabar murah dan setelah itu dalam film, musik rekaman, radio, dan televisi. Format ini terbukti sangat menarik untuk kelas-kelas pekerja kota yang baru bukan hanya di

⁸Luis Ramiro Beltran and Elizabeth Fox Cardona, *Comunicacion dominada: Estados Unidos en los medios de America Latina* (Mexico: Editorial Nueva Imagen, 1980).

⁹Jeremia Tunstall, *The Media are American: Anglo-American Media in the World* (New York: Columbia University Press, 1977).

⁷Armand Mattelart, *Multinational Corporations and the Control of Culture: The Ideological Apparatuses of Imperialism* (Brighton, Sussex: Harvester Press, 1979).

Amerika Serikat, melainkan juga di negara yang dipengaruhi bahasa Inggris, dan bahkan di sebagian besar dunia. Apa yang dilupakan oleh Tesis imperialisme media, menurut Tunstall, adalah tanggapan pemirsa.

Tunstall merasa skeptis terhadap usaha melindungi "kebudayaan-kebudayaan asli setempat" di negara-negara berkembang.¹⁰ Seringkali identitas kebudayaan nasional kurang kuat dan terdapat keanekaragaman bahasa atau pembagian-pembagian suku dan daerah. Selain itu terdapat kecenderungan menjadikan kebudayaan yang lebih asli dan tradisional sebagai milik suatu elit yang memerintah, sedangkan banyak bentuk kebudayaan tradisional lainnya tidak cocok bagi siaran atau media film.

Tunstall mengemukakan bahwa kebanyakan negara tidak akan mengalami Amerikanisasi sepenuhnya, kecuali tiga tingkat media.¹¹ Di satu sisi akan ada media "internasional" yang terutama akan tetap bersifat Anglo-Amerika yang maju dan akan menarik khususnya untuk orang kota dan orang kaya. Di sisi yang lain akan ada suatu campuran nasional, seperti industri film Hongkong, Mesir atau Mexico yang mempersatukan unsur-unsur kebudayaan nasional ke dalam suatu format Anglo-Amerika.

Risiko-risiko Imperialisme

Tunstall dan lain-lainnya mengemukakan bahwa dengan menjadi eksportir media yang besar pasti dapat mendatangkan pengaruh-pengaruh yang merugikan terhadap ambisi-ambisi imperialisme. Keterbukaan terus-

menerus terhadap liputan berita Amerika Serikat atau Inggris yang merefleksikan perdebatan dalam negeri menyebabkan negara-negara ini mendapat kecaman internasional. Negara yang membanjiri dunia dengan hiburannya yang murah dan ringan secara kultural tidak dipercaya, sedangkan negara-negara yang hanya mengeksport hasil-hasil artistik mereka yang bermutu akan memperoleh sambutan positif.

Rene Jean Ravault, Profesor komunikasi di Universitas Ottawa, membantah bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat yang mempunyai masukan media sangat rendah dari negara-negara lain akan menderita *myopia* kebudayaan.¹² Karena etnosentrisme linguistik dan kultural mereka, mereka kurang dapat bersaing dalam bidang ekonomi dan politik internasional.

Menurut Salinas dan Paldan, dominasi kebudayaan asing yang kasar dapat menjadi suatu katalisator bagi gerakan pembebasan nasional yang kuat.¹³ Kalau kaum elit diidentifikasi sebagai instrumen dominasi asing dan modernisator sekular yang mengancam nilai-nilai agama, seni, atau kesusasteraan, maka revitalisasi kebudayaan-kebudayaan asli dapat menjadi tonggak kampanye bagi penolakan kehadiran asing maupun modernisasi kaum elit yang memerintah.

Semua ini menunjukkan bahwa pemuatan kekuasaan politik, ekonomi, dan komunikasi yang kuat seringkali melahirkan oposisi pergerakan-pergerakan sosial. Memang, suatu kerangka yang lebih dialektis

¹²Rene Jean Ravault, some possible economic dysfunctions of the Anglo-American practice of international communications: a theoretical approach. *Unpublished Doctoral Dissertation*, University of Iowa, 1980.

¹³Opcit., p. 82.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

bagi analisis komunikasi-komunikasi internasional dapat merupakan pendidikan terbaik, sebab memperingatkan para peneliti terhadap kekuatan-kekuatan sosial baru yang menampilkan pola-pola alternatif komunikasi.

Alternatif untuk Tatanan Informasi Sekarang

Dalam laporan Komisi Internasional mengenai Studi Masalah Komunikasi (Komisi McBride) dari UNESCO disebutkan bahwa penelitian sekarang terlalu memusatkan perhatian pada penciptaan komunikasi-komunikasi yang lebih efektif tanpa mempedulikan validitas sosialnya. Menurut McBride, "Penelitian ... harus ... menyelidiki potensi kekuatan-kekuatan baru dan arah-arrah baru. Terdapat suatu kesadaran yang berkembang bahwa model-model asing tidak selalu sesuai ... Jadi makin penting keharusan untuk menciptakan bentuk-bentuk komunikasi yang cocok dan berkembang dari dalam".¹⁴ Tahun-tahun terakhir ini telah menyaksikan banyak analisis persoalan. Fokus terpenting penelitian masa depan adalah efektivitas bentuk-bentuk *alternatif* dari lembaga-lembaga komunikasi.

Menuju Otonomi Nasional dalam Komunikasi

Cees Hamelink berpendapat bahwa proses mendasar dalam pembentukan TIIB adalah suatu politik "disosiasi" ekonomi dan kebudayaan dari kekuatan-kekuatan dunia

yang besar.¹⁵ Dalam hal ini bukan autarki yang dimaksudkan, melainkan suatu bentuk pertukaran internasional yang memungkinkan negara berdaulat memilih bagian dari pengadaan internasional yang memajukan pembangunan saja. Hamelink membantah bahwa perspektif integrasionis dari banyak perdebatan TIIB sekarang ini secara fundamental dianggap salah. Faktor kesalahan dari pendekatan integrasionis tersebut antara lain penekanan tetap pada transfer dana, teknologi, dan pendidikan kepada negara-negara berkembang dengan suatu cara yang hanya dapat meningkatkan ketergantungan. Selain itu, penekanan pada *free flow* juga merupakan aspek pendekatan integrasionis yang membingungkan, sebab merupakan arus yang lebih seimbang di dalam sistem hirarkis yang ada dan di bawah penguasaan negara-negara maju.

Dalam perspektif "disosiasi" ini prioritas masalah-masalah penelitian sangat berbeda dari penekanan yang dulu, antara lain mengenai:

1. Macam tujuan nasional yang baru, pola komunikasi dan lambang pengintegrasian nasional baru yang kemungkinan timbul di dalam proses pergerakan-pergerakan rakyat yang berusaha membebaskan negara dari kaum-elit tradisional dan ketergantungan asing;
2. Bagaimana bentuk-bentuk umum "media" dan ungkapan artistik yang dihasilkan dalam pergerakan-pergerakan nasionalis dan memberikan dasar bagi lembaga-lembaga komunikasi baru. Bentuk-bentuk pengetahuan, pengalaman, kejadian-kejadian, dan pengertian-pengertian

¹⁴Sean MacBride et al., *Many Voices, One World Communication and Society Today and Tomorrow* (London: Kogan Page, 1980), 223.

¹⁵Cees J. Hamelink, *Derde Wereld en culturele emansipatie* (Amsterdam: Het Wereldvenster Baarn, 1978).

tentang pembangunan yang merupakan "informasi" penting dalam bangsa dan dalam pertukaran dengan negara berkembang lain. Sumber-sumber daya manusia bagaimanakah yang tersedia dalam bidang artistik maupun teknis dan manakah yang harus dipergunakan dengan sedikit mungkin pendidikan dari luar. Media apa yang cocok untuk kecakapan personal tersebut;

3. Macam pengawasan umum dan sosial media mana yang akan memberikan kebebasan dari kepentingan komersial dan kepentingan kaum elit tradisional maupun kebebasan dari campur tangan politik eksternal negara-negara maju. Hamelink kiranya akan memberikan penekanan kuat pada bentuk-bentuk pembuatan keputusan yang didesentralisasi dan/atau media yang lebih sederhana dan kurang profesional demi memungkinkan pengawasan lokal.¹⁶

Jaringan-jaringan Berita Dunia Ketiga

Tujuan utama TIIB adalah membentuk sistem pelayanan berita yang langsung diantara negara-negara berkembang pada tingkat regional atau internasional, mengingat negara Dunia Ketiga akan menjadi sumber dan pelanggan utama pelayanan berita; dan ini dapat dirancang khusus untuk kebutuhan informasi Dunia Ketiga daripada hanya melalui telegram bagi berita yang ditujukan pada surat kabar-surat kabar di negara maju. Juga, Dunia Ketiga akan mempunyai pengawasan berita yang keluar ke Dunia Pertama. Kini terdapat berbagai macam kantor berita

Dunia Ketiga, di mana yang paling terkenal adalah penampungan Berita Negara-negara Non-Blok yang bekerja melalui Kantor Berita *Tanjug* Yugoslavia.

Adalah sulit menemukan penelitian yang menilai apakah kantor berita Dunia Ketiga mencapai tujuan-tujuan umum yang dikemukakan dalam diskusi TIIB. *The Third World and Press Freedom* dari Philip Horton memuat laporan deskriptif tentang pengelompokan Kantor Berita Non-Blok, kantor berita regional di dunia Arab, *ACAN* dari Amerika Tengah, *Tanjug* Yugoslavia dan *Depthnew* Asia.

Diantara laporan tersebut, uraian tentang *ACAN* adalah yang paling lengkap, meskipun sebagian besar masih menyinggung sejarah, organisasi sekarang dan keadaan keuangan. Ada sedikit penilaian apakah berita berhubungan dengan tujuan kebebasan ekonomi dan politik di wilayah itu, atau bagaimana pergerakan-pergerakan ke arah perubahan sosial dilaporkan secara intern dan ekstern. Orang akan bertanya kelompok sosial apakah yang menjadi sumber berita dan siapakah yang menjadi penerima berita. Siapakah yang menjadi penjaga gawang dalam posisi kunci pendistribusian berita?

Tidak ada jaminan semudah itu sebab *ACAN* atau suatu kantor berita regional lain dimiliki Dunia Ketiga, dan sebenarnya berbeda dari kantor berita internasional besar dalam menangani informasi. TIIB telah dimengerti sebagai suatu gerakan karena ketergantungan pada sistem informasi yang tradisional. Dalam menganalisis kantor berita -- atau suatu aspek TIIB yang lain -- adalah penting mengembangkan kriteria yang jelas untuk menilai cara mencapai tujuan kebebasan TIIB.

¹⁶Ibid.

Jurnalisme Pembangunan

Para pengusul TIIB membantah bahwa konsep peranan jurnalisme dan gaya pelaporan harus berbeda di negara-negara Dunia Ketiga dikarenakan tingkat pembangunan yang berbeda (atau bahkan jalan pembangunan yang sangat berbeda) dan konteks sosial-kebudayaan non-Barat yang seringkali sangat berbeda. Dalam hal ini teori-teori Anglo-Amerika tentang pers yang mengasumsikan tradisi tertentu demokrasi parlementer kemungkinan tidak dapat dibenarkan.

Persoalannya adalah mencapai kesepakatan mengenai pengertian "pembangunan" dan "jurnalisme pembangunan". N. Aggarwala di dalam pembahasannya, "Berita dengan Perspektif Dunia Ketiga: Suatu Saran Praktis", membantah bahwa harus ada lebih banyak informasi umum dan mendalam tentang usaha-usaha pembangunan yang disajikan dan dinilai menurut cita-cita nasional dan tujuan-tujuan sosial negara Dunia Ketiga. Terlalu sering surat kabar-surat kabar Dunia Ketiga dan media lainnya mencoba meniru gaya tabloid sensasional Anglo-Amerika atau penekanan libertarian pada media sebagai ungkapan pendapat editor. Jurnalisme pembangunan tidak berarti sebagai berita dan selebaran informasi yang diawasi pemerintah, seperti beberapa koresponden dan para komentator Barat telah menafsirkannya, tetapi merupakan suatu usaha untuk mengarahkan komunikasi terhadap tujuan-tujuan ekonomi nasional dan sosial.

Definisi konkret komunikasi berorientasikan pembangunan, atau lebih baik, berorientasikan perubahan sosial pertama mulai datang dari para peneliti komunikasi Dunia Ketiga. Luis Ramiro Beltran mengusulkan

suatu model komunikasi mendasar yang memberikan jawaban terhadap persoalan ketergantungan internasional dan penguasaan elit dalam negeri atas komunikasi.¹⁷ Berpedoman pada filsuf Paulo Freire dan teoretisi serta politisi Amerika Latin lainnya yang bekerja dalam komunikasi, Beltran mengusulkan suatu model komunikasi yang menekankan akses pada media, dialog, dan partisipasi, yang memungkinkan rakyat mempunyai kesempatan menentukan politik, perencanaan dan tindakan. Penelitian lebih lanjut, sebagai tindak lanjut usul-usul seperti dari Beltran itu, akan melangkah jauh menggantikan teori-teori Anglo-Amerika tradisional tentang pers yang didasarkan pada falsafah libertarian dengan konsep hubungan komunikasi dan perubahan sosial yang lebih cocok dalam konteks negara-negara baru.

Komunikasi Partisipatif

Terdapat suatu keyakinan yang berkembang diantara para peneliti komunikasi di Dunia Ketiga, khususnya di Amerika Latin, bahwa dominasi sistem komunikasi oleh negara industri maju dan kaum elit tradisional di negara berkembang adalah akibat langsung dari suatu penekanan pada komunikasi sebagai institusi komunikasi massa. Media massa di negara-negara dengan tingkat desentralisasi pemerintah setempat yang tinggi dapat dilengkapi dengan surat kabar lokal, pemancar radio lokal, penggunaan telepon-telepon yang mudah, dan sebagainya. Banyak negara berkembang tidak mempunyai prasarana organisasi perantara ini. Mereka dibiarkan pasif menerima media massa se-

¹⁷Luis Ramiro Beltran, "A Farewell to Aristotle: 'Horizontal' Communication" dalam *Communication* 5, no. 1 (April, 1980), 5-41.

bagai satu-satunya bentuk komunikasi. Ini menghalangi mayoritas besar penduduk untuk mengembangkan partisipasi dalam pembuatan keputusan lokal, regional, atau nasional.

Prioritas tinggi penelitian adalah pengembangan alternatif partisipatif untuk menggantikan bentuk komunikasi sekarang "yang ditandai penguasaan monopoli dalam bentuk apa pun".¹⁸ Ciri inheren dari bentuk seperti itu -- vertikalisme dan otoriterianisme -- harus dihapus. Dihadapkan dengan ciri itu, TIIB harus mengandung kebalikannya: demokratisasi, akses publik yang murni, dan partisipasi sosial.

Akhir-akhir ini program komunikasi partisipatif cenderung meningkat. Divisi komunikasi dari *ILET* di Mexico, misalnya, mempunyai program penelitian tentang model-model komunikasi dengan partisipasi sosial aktif.¹⁹ Seminar-seminar internasional tentang komunikasi partisipatif telah disponsori oleh CIESPAL (1978) di Aquador dan Beograd (1977) di bawah sponsor UNESCO.

Pengalaman-pengalaman ini menekankan pemberian sarana berkomunikasi kepada kelompok marginal dan tak berdaya agar dapat berperan aktif dalam pembuatan keputusan regional atau pun nasional. Seringkali penekanan mengarah pada format komunikasi kelompok media kecil, yang meliputi audio visual, unit video-tape mobil keliling atau gabungan media massa dengan

kelompok teknik -- atau "media perantara" -- radio pelayanan umum setempat dengan pembuatan program yang dilakukan secara lokal dan surat kabar komunitas.

Menurut O'Sullivan dan Kaplun, beberapa program dengan ciri-ciri partisipatif berlangsung terus-menerus setelah "pemberian dana proyek" ditunda.²⁰ Seperti mereka kemukakan, hampir tidak mungkin dapat mengusulkan partisipasi dalam proyek dengan sponsor lembaga yang diprakarsai oleh badan-badan dari luar. Komunikasi partisipatif terjadi kalau ada usaha organisasional spontan oleh kelompok-kelompok tingkat bawah, yang biasanya untuk membe-la kepentingan tertentu. Ini menunjukkan bahwa penelitian tentang komunikasi partisipatif harus melihat organisasi-organisasi tani atau buruh tingkat bawah sebagai model yang paling baik.

Kata Terakhir

TIIB adalah salah satu aspek dari gerakan kemerdekaan nasional yang telah membentuk negara-negara baru di Afrika, Asia dan pemerintah-pemerintah dukungan rakyat di Amerika Latin. Gerakan Non-Blok yang telah begitu penting dalam menetapkan masalah-masalah mendasar TIIB, juga merupakan perluasan gerakan kemerdekaan pada tingkat hubungan politik internasional.

TIIB tidak akan dicapai di dalam ruangan-ruangan perencanaan pemerintah (mereka dapat mengajukan rencana-rencana, meskipun hasil-hasilnya belum pasti), melainkan lebih oleh perbuatan para wartawan dan para penyiar yang merupakan bagian dari gerakan kemerdekaan nasional.

¹⁸Cess Hamelink, ed., *Communications Research in Third World Realities: Report of a Policy Workshop Held at the Institute of Social Studies* (The Hague: ISS, 1980), 32.

¹⁹Jeremiah O'Sullivan Ryan and Mario Kaplun, *Communication Methods to Promote Grass Root Participation for an Endogenous Development Process*. Preliminary report to be presented to UNESCO, 1979.

²⁰Ibid.

Salah satu keputusan penting dari loka-karya politik para peneliti Dunia Ketiga di Den Haag bulan Februari 1980 ialah bahwa peneliti yang ingin terlibat dalam cara tertentu dengan TIIB tidak dapat dengan mudah menjadi seorang peninjau yang berdiri di luar atau membuat analisis setelah tindakan terjadi. Penelitian harus bersifat partisipatif dalam arti bahwa baik para pelaku dan para peneliti berinteraksi dalam menciptakan pandangan baru tentang realitas dan lembaga sosial baru. Jadi peneliti adalah juga seorang pelaku yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan yang menghasilkan TIIB.²¹

Perspektif Penelitian Komunikasi

Secara umum dapat dikatakan bahwa fase dalam perdebatan TIIB sedang berakhir dan suatu fase baru sedang mulai. Fase baru akan kembali membicarakan politik komunikasi nasional dan pencarian alternatif menggantikan vertikalisme dan otoriterianisme dalam lembaga-lembaga komunikasi.

Banyak penelitian mengenai TIIB yang terfokus pada pembuktian bahwa terdapat dominasi Anglo-Amerika yang kuat dalam komunikasi internasional. Disamping itu, juga banyak penelitian yang telah mencoba menunjukkan bahwa jumlah besar arus berita dan hiburan asing dapat mempengaruhi perkembangan kebudayaan negara-negara berkembang. Tentang hal terakhir ini belum ada bukti yang jelas mengenai intensitas dan macam pengaruh kebudayaan. Apa yang nyata ialah bahwa organisasi kelembagaan media yang telah masuk dari negara-negara Atlantik Utara tidak cocok dengan kebu-

tuhan komunikasi negara-negara berkem-
bang.

Penekanan dalam alokasi sumber-sumber yang langka bagi penelitian komunikasi, kini tampaknya beralih dari analisis persoalan ke pencarian solusi dan alternatif dalam lembaga-lembaga komunikasi.

Dari Mana Memulai Pencarian

Usaha untuk menemukan alternatif dapat dilakukan melalui studi deskriptif tentang usaha-usaha dalam siaran yang sekarang atau dengan menilai proyek-proyek yang kurang berhasil, sebab titik tolaknya adalah lembaga siaran yang dalam kebanyakan hal merupakan transplantasi Anglo-Amerika. Ini hanya sekadar contoh dari pengertian keliru yang membantah bahwa kita harus memperkenalkan media untuk menciptakan komunikasi. Suatu pendekatan yang lebih baik ialah menerima bahwa pola-pola komunikasi yang sudah ada dalam struktur sosial-kebudayaan dan bahwa media yang cocok -- entah itu siaran atau sesuatu yang lain -- harus dibiarkan muncul dari dan memperluas saluran-saluran komunikasi yang ada dan bentuk-bentuk ungkapan kebudayaan. Titik tolak studi tentang alternatif harus berupa konteks sosial kebudayaan yang lebih luas dan pola komunikasi yang relatif informal.

Misalnya, pergerakan pembebasan nasional di banyak negara baru berawal suatu pola komunikasi dan bahasa baru lain yang bertentangan dengan sistem komunikasi kolonial yang dominan atau yang didominasi asing. Di negara-negara seperti Tanzania telah ada politik pembangunan jaringan komunikasi nasional di sekitar organisasi alternatif ini dan pembatasan pemasukan in-

²¹Hemelink, *Communication Research*.

stitusi media asing. Para pemimpin politik dalam pergerakan ini biasanya sadar akan hal ini, tetapi suatu studi yang lebih teliti dapat membantu menunjukkan hubungan antara pola-pola komunikasi yang informal, menonjol, dan lembaga-lembaga media yang sama.

Penyelarasan Lembaga Komunikasi yang Berbeda-beda

Pengembangan suatu TIIB disertai pola-pola yang tidak sama dengan lembaga-lembaga media yang cocok dengan konteks keragaman politik dan sosial kebudayaan menjadi suatu persoalan koordinasi antarkebudayaan. Kita sudah melihat persoalan komunikasi antarkebudayaan ini dalam perde-

batan tentang asas arus bebas informasi. Para pembela asas arus bebas telah memikirkan bagaimana hak ini telah dimenangkan di masa lalu dalam menghadapi sensor kerajaan, penyelidikan agama, pajak-pajak atas surat kabar-suratkabar, dan pengawasan totaliter lainnya atas kebebasan komunikasi.

Mereka yang membela kedaulatan nasional dan otonomi yang lebih besar dari kontrol pemerintah memikirkan bagaimana negara-negara berkembang yang lebih kecil dapat menghadapi pengaruh perusahaan-perusahaan multinasional yang kuat dan kaum elit tradisional yang mengakar. Satu-satunya lembaga yang mempunyai kekuasaan ini adalah pemerintah. Dalam kedua hal ini yang menjadi keprihatinan adalah bagaimana melindungi kebebasan menyatakan pendapat bagi jumlah terbesar, terutama kelompok-kelompok minoritas.

